

Kritisi Pembangunan Mal, Seniman Gelar "Public Art"

YOGYAKARTA, KOMPAS — Puluhan seniman akan menggelar *public art* di beberapa tempat strategis di Kota Yogyakarta, Senin (11/10) hingga Rabu (13/10) ini. *Public art* dengan jargon "Di Sini akan Dibangun Mal" dimaksudkan untuk mengkritisi kontroversi pembangunan mal yang cenderung tidak mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik budaya masyarakat.

Salah satu koordinator aksi, Dosen Fakultas Seni Rupa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta Drs Suwarno Wisetrotomo, di Yogyakarta, Sabtu (9/10), mengatakan, aksi dilakukan sekitar 30-an seniman, berupa karya dua atau tiga dimensi, seni pertunjukan, atau bentuk lain. Setiap karya seni yang ditampilkan akan menyertakan teks "Di Sini akan Dibangun Mal" dengan tulisan besar-besar yang mudah dibaca. Seniman juga bisa menambahkan teks lain sesuai kreativitas masing-masing.

Aksi para seniman akan dipusatkan di beberapa titik kota, antara lain di Alun-alun Utara, halaman DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), halaman Kepatihan, Stasiun Tugu, kawasan Yogyakarta nol kilometer, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wirogunah. Aksi serupa juga dilakukan di sekitar Jembatan Kewek, Taman Adipura, Bunderan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dan di dekat gedung Gramedia. Aksi itu diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat, seperti Komunitas Peduli Ruang Publik Kota (Kerupuk), Jogja Heritage Society (JHS), Yayasan Seni Cemeti, Kedai Kebun Forum, Bentara Budaya Yogyakarta, dan Komunitas Senthir.

Menurut Kuss Indarto, aktivis Kerupuk Yogyakarta, karya-karya seniman itu mungkin tidak berumur panjang karena sebagian memang dirancang sebagai seni sesaat (*ephemeral arts*). Seluruh karya akan didokumentasikan dan dipamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta, 14-17 Oktober 2004.

Menurut "Ong" Harry Wahyu, aksi dan teks "Di Sini



Suwarno W

akan Dibangun Mal" merupakan upaya kita untuk menyadarkan kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha, dan pemerintah agar kembali merenungkan pembangunan mal secara kritis. "Benarkah masyarakat Yogyakarta membutuhkan mal, apakah mal itu sesuai dengan karakteristik budaya Yogyakarta? Kalau benar, apakah mal-mal itu harus berbentuk super blok, yaitu bangunan kubus seperti di luar negeri?" katanya.

Para seniman mengimbau, visi pragmatis mal untuk meraih keuntungan ekonomi hendaknya disertai penghargaan atas warisan budaya sendiri. Sebab, budaya itu merupakan kekayaan dan kekuatan Yogyakarta yang dapat "dijual" melalui paket pariwisata. "Kenapa kita mengadopsi budaya asing apa alasannya, bahkan dengan merusak budaya sendiri. Padahal, masyarakat luar negeri mulai meninggalkan konsep mal, dan mereka mati-matian melestarikan budaya lokal. Ini tragis, ironis," kata Ong.

Diharapkan, pembangunan di Yogyakarta tidak dilakukan sewenang-wenang, dan selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Rencana pembangunan mal memunculkan ketegangan, karena tidak dipenuhinya syarat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), tidak dikomunikasikan, bahkan disertai perusakan bangunan warisan budaya. (IAM)